

FAKTOR MENINGKATNYA ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERTAHANAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) 2022

INCREASING FACTORS FOR THE BUDGET ALLOCATION OF THE MINISTRY OF DEFENSE WITHIN THE 2022 STATE BUDGET

Muhammad Ariel Azfar Hadi, Muhammad Irgi Sya'awal, Muhammad Reyhan Afif Septyatna, dan Sarah Finka Simangunsong

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
(arielhadi3@gmail.com, irgimuhammad7@gmail.com, reyhanafif.ra@gmail.com, sarahfsimangunsong@gmail.com)

Abstrak – Anggaran merupakan komponen penting untuk menunjang jalannya pemerintahan dan negara. Dalam membuat anggaran, aspek yang harus diperhatikan adalah nilai dan kebermanfaatannya sehingga dampak yang ditimbulkan akan dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Memasuki tahun 2020, virus COVID-19 mulai masuk ke Indonesia, sehingga pada saat itu ekonomi diprediksikan akan mengalami penurunan sampai beberapa tahun ke depan. Bidang kesehatan yang bersinggungan langsung dengan permasalahan ini menjadi perhatian yang serius, karena berdampak terhadap bidang-bidang lain, khususnya bidang ekonomi dan sosial. Bidang ekonomi dan sosial menjadi yang paling relevan karena dampak yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 dapat dirasakan langsung pada masyarakat. Namun, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 tercatat Kementerian Pertahanan yang memiliki anggaran terbesar meskipun permasalahan kesehatan, ekonomi, dan sosial belum selesai. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dari literatur dan dokumentasi dari berbagai sumber, sehingga data-data yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan validitas dan legalitasnya. Teori utama yang digunakan dalam jurnal ini adalah teori patron-klien. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara satu orang dengan yang lain yang kedudukannya lebih tinggi. Dari data-data dan sumber-sumber yang sudah dianalisis, alokasi anggaran Kementerian Pertahanan tidak relevan dinilai dari situasi dan kondisi saat ini, terlebih Kementerian Pertahanan adalah kementerian dengan anggaran yang paling besar dalam APBN tahun 2022.

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), COVID-19, Ekonomi, Kementerian pertahanan, Patron-klien, Sosial

Abstract – The budget is an important component to support the running of the government and the state. In making a budget, the aspect that must be considered is the value and usefulness so that the general public will feel the impact. Entering 2020, the COVID-19 virus began to enter Indonesia so at that time the economy was predicted will decline for the next few years. The field of health that is directly related to this problem is a serious concern because it has an impact on other fields, especially the economic and social fields. The economic and social fields are the most relevant because the impact caused by the COVID-19 virus can be felt directly in the community. However, in the preparation of the 2022 State Revenue and Expenditure Budget, it was noted that the Ministry of Defense had the biggest budget even though health, economic and social problems had not been resolved. This journal uses qualitative methods from literature and documentation from various sources so that the data collected can be accounted for validity and legality. The main theory used in

this journal is the patron-client theory. This theory explains how the relationship between one person and another with a higher position. From the data and sources that have been analyzed, the budget allocation for the Ministry of Defense is irrelevant judging from the current situation and conditions, especially since the Ministry of Defense is the ministry with the biggest budget in the 2022 State Budget.

Keywords: State budget, COVID-19, Economic, The ministry of defense, Patron-client, Social

Pendahuluan

Anggaran adalah komponen penting yang menopang jalannya sebuah negara. Namun proses penyusunan anggaran hanya bisa dilakukan oleh para pemangku kebijakan yang juga merupakan aktor politik (Hamka dkk, 2022). Akibatnya, proses politik mempunyai pengaruh kuat dalam proses penyusunan anggaran. Sehingga proses penyusunan anggaran seringkali disebut sebagai politik anggaran. Hal ini mengingat dalam penyusunan anggaran perlu dihadiri oleh pemerintah sebagai pihak yang mengajukan program dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pengawas berperan untuk ikut mengesahkan anggaran yang telah diajukan tersebut (Lestyowati dkk, 2020). Tetapi semuanya tidak semudah mengajukan dan mengesahkan saja.

Tulisan ini akan menganalisis sejauh mana proses politik

memengaruhi proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Berbagai perubahan terjadi pada prioritas anggaran dari tahun tersebut dibanding tahun sebelumnya. Berbagai perubahan ini tidak lepas dari peran para aktor politik yang terlibat didalamnya. Menarik untuk melihat bagaimana proses perancangan Undang-Undang APBN Tahun 2022 ini dilakukan hingga dapat membuat terjadinya kenaikan pada pos anggaran kementerian pertahanan dan penurunan pada pos kementerian kesehatan. Selain itu, menarik untuk menganalisis bagaimana proses kompromi politik yang dilakukan oleh pemerintah dengan DPR untuk sampai pada kata sepakat.

RUU APBN Tahun 2022 telah resmi menjadi Undang-Undang. Artinya seluruh rencana kerja pemerintah selama tahun 2022 telah terperinci dalam satu dokumen tersebut. Menariknya, di tengah kesulitan ekonomi yang menimpa Indonesia akibat pandemi COVID-19, justru pada APBN 2022 pos anggaran terbesar diberikan pada

kementerian pertahanan. Padahal Kementerian Keuangan sendiri menyatakan bahwa APBN 2022 ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pemulihan ekonomi. Namun nyatanya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan mendapatkan anggaran di bawah Kementerian Pertahanan. Padahal pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan suatu bangsa. Dengan pendidikan, sumber daya manusia yang akan berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa akan ditentukan kualitasnya (Purwanto, 2006). Bahkan cukup wajar jika anggaran yang diajukan disetujui, naik drastis hingga menjadi yang terbesar. Kemudian dirumuskan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke-4 yang isinya mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan anggaran belanja untuk sektor pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN atau APBD. Artinya sektor pendidikan yang

notabene adalah sektor paling diprioritaskan pun tetap kalah besar anggarannya dengan sektor pertahanan.

Alokasi anggaran besar yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dikarenakan adanya sosok Prabowo Subianto yang memimpin kementerian tersebut. Kualitas pribadi menentukan efektivitas kekuasaan (Surbakti, 2019). Citra pemimpin karismatik yang telah Prabowo gunakan selama ini untuk bertarung di pemilihan presiden telah membuat kualitas pribadinya lebih mapan. Ini membuat efektivitas kekuasaannya sebagai menteri pertahanan menjadi semakin baik.

Selain itu, faktor Gerindra yakni partai Prabowo yang memiliki jumlah kursi terbanyak ketiga di DPR RI semakin memperkuat koalisi pemerintah. Koalisi sendiri merupakan upaya kerja sama antar partai politik yang bertujuan untuk memperoleh suara terbanyak dari konstituen dan menghindari konflik antar sesama partai (Abdar, 2018). Dengan semakin banyak suara yang dapat mereka raih dari konstituen dapat semakin melegitimasi pemerintahan yang sedang berkuasa. DPR RI sebagai lembaga legislatif bertugas mengesahkan RUU APBN yang diajukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Dengan begitu, seharusnya

power interplay DPR RI memiliki pengaruh yang besar. Namun pada kenyataannya, dengan mayoritas besar koalisi pemerintah di DPR RI membuat *power interplay* DPR RI melemah. Sebab sistem koalisi di Indonesia mengakibatkan semua parpol koalisi pemerintah harus mendukung semua program pemerintahan yang mereka dukung termasuk RAPBN yang diajukan.

Dalam RAPBN yang diajukan oleh eksekutif untuk tahun anggaran 2022, anggaran pertahanan menjadi yang tertinggi. Anggaran pertahanan memang merupakan salah satu komponen terpenting yang ada dalam sebuah APBN. APBN merupakan sebuah daftar sistematis dan terstruktur yang didalamnya terdapat rencana penerimaan dan juga pengeluaran negara dalam satu masa periode pemerintahan (Pringgodayanti, 2016).

Namun, APBN ini terancam disalahgunakan oleh para aktor politik di eksekutif dan legislatif akibat maraknya hubungan patron-klien yang merupakan pola hubungan antara satu orang yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga ia dapat bertindak melindungi beberapa orang lainnya

yang kedudukannya lebih rendah (Zaman, 2009). Ini dapat menjadi sinyal berbahaya sebab legislatif memiliki kekuasaan untuk meninjau, menyetujui, atau mengubah APBN ini (Willoughby, 2014).

Adapun beberapa masalah yang diamati adalah mengapa ketika negara sibuk melakukan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, justru alokasi anggaran kementerian pertahanan menjadi yang terbesar dan diprioritaskan dibandingkan kementerian lain? Apa yang menyebabkan anggaran kementerian pertahanan tidak masuk dalam *refocusing* tahun 2022? Bagaimana *power interplay* para aktor politik terhadap peningkatan anggaran kementerian pertahanan? Kemudian, bagaimana peran dari masyarakat sipil yang tentunya merasakan bahwa alokasi anggaran kepada kementerian pertahanan dinilai kurang relevan pada kondisi saat ini?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengkajian terhadap buku-buku, jurnal-jurnal, berita, laporan dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam

penelitian ini (Nazir, 2003). Dalam melakukan prosedur penelitian dari studi kepustakaan, kami menghimpun informasi-informasi dan data-data.

Hasil dan Pembahasan

Penyebab Kementerian Pertahanan Mendapatkan Alokasi Anggaran Terbesar

APBN merupakan sebuah daftar sistematis dan terstruktur yang didalamnya terdapat rencana penerimaan dan juga pengeluaran negara dalam satu masa periode pemerintahan (Pringgodayanti, 2016). Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan anggaran artinya harus berpatokan pada Undang-Undang APBN. Berdasarkan nota keuangan RAPBN 2022, anggaran sebesar Rp133,92 Triliun tersebut dibagi kedalam tujuh program utama kementerian Pertahanan. Program yang paling menyedot banyak anggaran adalah Program Dukungan Manajemen sebesar 73,3 triliun. Sedangkan program yang paling signifikan meningkat anggarannya adalah Program Modernisasi Alutsista, Non-Alutsista, dan Sarpras Pertahanan serta Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit (RAPBN, 2022).

Peningkatan anggaran pertahanan disebabkan karena sektor pertahanan diharapkan dapat menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Ini dilakukan demi menjamin program-program pembangunan nasional berjalan dengan baik sesuai dengan rencana tanpa ada kendala yang berarti. Kemudian fungsi pertahanan dalam jangka menengah juga menekankan pada visi penguatan keamanan wilayah laut, perbatasan, hingga pulau-pulau terkecil dan terluar. Selain itu, visinya juga ingin meningkatkan pemenuhan kebutuhan Alutsista dan peralatan pertahanan lainnya, serta peningkatan profesionalisme yang dibentuk melalui serangkaian latihan dan penugasan operasi militer maupun nonmiliter. Pemenuhan segala kebutuhan ini juga dilakukan untuk menunjang ambisi kita untuk menjadi negara yang terkuat di Asia Tenggara di bidang militer. Secara spesifik untuk mencapai segala tujuan tersebut anggaran kemudian dibelanjakan untuk pengadaan alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista, Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Pertahanan, penguatan cadangan pangan nasional, penguatan revolusi mental dan kebudayaan, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Selain

itu, anggaran juga spesifik dipakai untuk mendukung sumber daya kepada sektor pertahanan dan keamanan agar dapat melindungi stabilitas negara di salah satu wilayah prioritas pembangunan yaitu Maluku dan Papua, khususnya di Kabupaten Nduga. Cara perang atau jenis kekerasan lain yang digunakan untuk merebut kepentingan sudah tidak bisa digunakan lagi. Cara-cara lama tersebut hanya akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Misalnya kita bisa lihat nasib Rusia pasca invasi militernya ke negara Ukraina. Rusia setelah invasi tersebut mendapatkan banyak sekali sanksi internasional dari negara-negara lain yang merugikan kehidupan masyarakat Rusia sendiri. Perekonomian negara tersebut dikabarkan sangat terguncang setelah sanksi berat dari berbagai negara Barat (Tempo.co, 2022). Dalam berbagai kesempatan berbicara di depan publik khususnya pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres), Prabowo selalu menekankan pada visinya untuk memperkuat pertahanan Indonesia yang menurutnya masih rapuh (dw.com, 2019). Pemikirannya yang masih

terbilang konservatif terkait pertahanan negara menjadi salah satu penyebab munculnya ambisi tersebut. Konservatif merupakan sikap seseorang yang selalu menjaga tradisi lama dan menentang tradisi baru yang timbul akibat modernisasi (Thomson, 1999). Sedangkan Ketika muncul pada abad ke-21, ia telah berhenti dari karir militernya. Ini menjadi titik tolak munculnya asumsi bahwa ia masih konservatif yang kemudian mengakibatkan kurang pekanya ia terhadap perubahan kultur pertahanan pada era saat ini. Padahal diplomasi pertahanan kini yang justru menjadi alat utama untuk mengatasi tantangan pertahanan negara-negara modern (Anwar, 2018).

Kemudian faktor lain yang memengaruhi lolosnya anggaran Kementerian Pertahanan adalah adanya *power interplay* dengan DPR RI. Terbukti dengan tidak adanya penolakan sedikitpun dari seluruh anggota DPR RI dari anggaran yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan tersebut. Hanya saja ada sedikit catatan yang diberikan oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP agar Kementerian Pertahanan memperhatikan pembelanjaan dengan baik dan sesuai dengan kondisi situasi dalam maupun luar negeri saat ini (Detik.com, 2021). Padahal kekuasaan anggaran legislatif selanjutnya dipengaruhi

oleh kemampuan legislatif untuk meninjau, menyetujui, atau mengubah APBN ini (Willoughby, 2014). Sistem multipartai Indonesia mengakibatkan setiap calon Presiden harus membentuk koalisi partai yang besar untuk bisa menang dan mempertahankan kekuasaannya. Kemudian, meskipun Indonesia menganut sistem presidensial tetapi pada praktiknya legislatif memiliki peran besar untuk mengawasi eksekutif termasuk harus menyetujui Rancangan Anggaran yang diajukan oleh cabang eksekutif. Akibatnya, hal tersebut menimbulkan hubungan patron klien antara eksekutif dengan legislatif. Pola hubungan ini terjalin antara satu orang yang kedudukannya lebih tinggi sehingga ia dapat bertindak melindungi beberapa orang lainnya yang kedudukannya lebih rendah (Zaman, 2009). Sehingga, tanpa tertulis otomatis harus mendukung seluruh program pemerintah yang akan diajukan ke legislatif karena merasa kader mereka sendiri yang membuat program tersebut. Ditambah lagi dengan jumlah anggota DPR RI dari koalisi pemerintah yang saat ini memiliki

suara mayoritas. Ini menjadi salah satu faktor kuat lolosnya anggaran Kementerian Pertahanan.

Kemudian jika diperhatikan secara detail alokasi anggaran Kementerian Pertahanan, ada beberapa hal teknis yang memengaruhi pembengkakan anggaran ini. Pemerintah memiliki RPJMN 2020-2024 sebagai program jangka menengah. Untuk itu semua kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan perlu merancang RPJMN untuk tahun 2020-2024. RPJMN yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan ini merupakan penjabaran dari visi misi Presiden. Kementerian Pertahanan menamakan RPJMN ini sebagai Rencana Strategis UO Kementerian Pertahanan. Salah satu fokus utama dari rancangan tersebut adalah terciptanya reformasi birokrasi di setiap kementerian termasuk Kementerian Pertahanan. Untuk menyukseskan visi reformasi birokrasi tersebut, kemudian Kementerian Pertahanan membuat Program Dukungan Manajemen yang menyedot anggaran sebesar Rp73,3 triliun. Anggaran Program Dukungan Manajemen ini bahkan menjadi yang paling besar alokasinya. Ini artinya reformasi birokrasi yang terus digaungkan oleh pemerintahan saat ini membuat anggaran program dukungan manajemen

naik secara signifikan sebesar 4,25% dari APBN 2021 sebesar Rp 7.319,9 triliun menjadi Rp 73,307,0 triliun pada tahun 2022 yang akhirnya memengaruhi besarnya anggaran Kemendagri pada APBN 2022.

Alokasi Anggaran Kementerian Pertahanan Kurang Relevan di Masa Pandemi COVID-19

Pandemi yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020, masih menjadi permasalahan yang serius untuk segera dibenahi. Terhitung dua tahun sejak tahun 2020, Indonesia dapat dikatakan mengalami ketertinggalan dalam menangani wabah yang bersifat global. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tidak terdapat adanya nilai konkret sehingga berita-berita yang tidak memiliki sumber dan hoaks dapat sangat mudah disebar. Akibatnya, masyarakat menjadi sasaran oleh para penyebar hoaks, yang dalam hal ini, akan memengaruhi imunitas kesehatan masyarakat. Pada tahun ini, tepatnya bulan Januari hingga Februari 2022, masih terdapat ledakan kasus COVID-19 dengan varian baru yang disebut Omicron. Yang dapat dikatakan juga bahwa penanganan, kebijakan, dan tindakan

yang dilakukan pemerintah dalam rangka upaya untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 belum berdampak langsung pada masyarakat. Banyaknya kepentingan para elit juga menyebabkan terhambatnya penanganan COVID-19 ini, sehingga campur tangan elit kepada kebijakan berakibat pada masyarakat yang sedang kesulitan melewati masa krisis ini. Maraknya pegawai yang dirumahkan, penanganan pasien COVID-19, meningkatnya pengangguran, dan melonjaknya angka COVID-19 yang tidak diduga, seharusnya menjadi tolok ukur bahwa masa pandemi ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah sehingga dapat cepat berakhir atau setidaknya mereda.

Belanja pemerintah pusat dari tahun ke tahun terhitung sejak 2016 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, sebelum pandemi di Indonesia yaitu tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,2%. Langkah kebijakan belanja pemerintah pusat antara lain: peningkatan kualitas SDM berupa KIP Kuliah, Kartu Prakerja, keberlanjutan penyediaan layanan kesehatan, penguatan perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Namun dengan hadirnya COVID-19, perubahan postur dan rincian anggaran dilakukan oleh

Presiden Joko Widodo karena menimbang defisit yang akan dialami oleh negara.

Pada tahun 2022 ini, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang paling besar dalam pengalokasian anggaran. Hal tersebut tentu patut dipertanyakan karena permasalahan pandemi yang belum usai, yang seharusnya dapat dialokasikan kepada kementerian yang lebih membutuhkan atau setidaknya relevan dengan permasalahan pandemi ini. Dalam kondisi krisis seperti ini, relevansi dan transparansi anggaran menjadi hal yang paling krusial karena masyarakat yang terdampak langsung butuh informasi dan kejelasan mengenai krisis yang tidak kunjung usai (Hajad dkk, 2021). Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial seharusnya menjadi kementerian yang menerima anggaran lebih besar karena kenaikan harga BBM dan lain-lain saat ini juga melonjak naik, begitupun peristiwa sebelumnya yaitu kelangkaan minyak goreng.

Perbandingan Penggunaan Alokasi Anggaran Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Lain

Timbulnya pertanyaan mengenai tujuan dan maksud dari alokasi anggaran kepada Kementerian Pertahanan yang masih dipertanyakan karena tidak adanya relevansi terhadap krisis kesehatan dan sosial di Indonesia saat ini dan dua tahun belakangan ini. Tahun 2022 anggaran Kementerian Pertahanan sendiri mengalami peningkatan sebesar 13,28% dari *outlook* APBN 2021. Pada tahun 2021, *outlook* APBN Kementerian Pertahanan sebesar Rp118,2 triliun, dan pada tahun 2022 anggaran Kementerian Pertahanan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai Rp133,9 triliun untuk menjalankan programnya.

Dalam Kementerian Kesehatan sendiri, saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Menteri Budi Gunadi Sadikin menyampaikan anggaran yang didapat Kementerian Kesehatan sebesar Rp96,85 triliun. Dari 89% anggaran tersebut, Kementerian Kesehatan akan mengalokasikan anggarannya kepada transformasi kesehatan. Transformasi kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional yang nilainya mencapai Rp78,93 miliar. Sedangkan sisanya digunakan untuk

dukungan manajemen sebesar Rp10,42 miliar, pendidikan pelatihan dan vokasi sebesar Rp2,95 miliar, pencegahan dan pengendalian penyakit sebesar Rp2,67 miliar, kesehatan masyarakat sebesar Rp1,77 miliar, riset dan inovasi ilmu pengetahuan serta teknologi sebesar Rp664 juta. Jika dilihat kembali pada unit utama yaitu pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional, detail rinciannya adalah Sekretaris Jenderal sebesar Rp49,63 miliar, dan Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp20,46 miliar (Merdeka.com, 2022).

Kenaikan harga BBM, kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, banyaknya pegawai yang dirumahkan sehingga mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, menjadi permasalahan yang cukup kompleks bagi Kementerian Sosial dalam menangani hal tersebut. Komisi VIII DPR menyetujui anggaran yang diajukan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp78,25 triliun, yang rencana penggunaannya adalah Rp74,08 triliun untuk belanja Bantuan Sosial berupa Kartu Sembako, Rehabilitasi SOSIAL RTLH, alat bantu aksesibilitas, bantuan korban bencana, Program Keluarga

Harapan, Bantuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan lainnya ucap Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII. Secara garis besar, Kementerian Sosial mengalokasikan dana prioritas kepada perlindungan sosial senilai Rp77,15 triliun, dan program dukungan manajemen senilai Rp1,09 triliun (Kemensos.go.id, 2021).

Sementara di bidang pendidikan juga terkena dampaknya akibat dari pandemi COVID-19 yaitu, tidak maksimalnya sistem pembelajaran yang dilakukan selama pandemi, sehingga akan berakibat pada penurunan kualitas SDM, khususnya generasi penerus bangsa. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertanggung jawab atas hal ini, pada APBN 2022 mendapatkan anggaran sebesar Rp 72,99 triliun untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan dalam bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, dalam data yang dihimpun dari web Kementerian Keuangan mengenai APBN, Kemendikbudristek dari tahun 2020-2022 terus mengalami penurunan anggaran. Pada tahun 2020, Kemendikbudristek menerima anggaran sebesar Rp79.061,8 triliun, lalu pada

tahun 2021 sebesar Rp78.176,6 triliun, dan pada tahun 2022 sebesar Rp72,99 triliun. Pada tahun 2022, pemerintah memangkas 6,6% anggaran Kemendikbudristek dari tahun sebelumnya. Prioritas utama dalam anggaran Kemendikbudristek tahun 2022 adalah penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 17,93 juta siswa, penerima KIP Kuliah sebanyak 646 ribu mahasiswa. Jika melihat permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan pada pandemi COVID-19 adalah keterbatasan pengetahuan mengenai teknologi dan kepemilikan alat elektronik digital oleh masyarakat.

Penyebab Anggaran Kementerian Pertahanan Tidak Mendapatkan Refocusing Tahun 2022

Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 (RAPBN, 2022). Dalam RAPBN tersebut, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp133,9 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 13,28% jika dibandingkan dengan APBN 2021 yang berjumlah Rp118,2 triliun. Berdasarkan tabel rencana penggunaan anggaran tersebut, terlihat bahwa alokasi anggaran Kemenhan di RAPBN 2022 terbesar digunakan untuk Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan serta membeli senjata dalam Program Modernisasi Peralatan Umum Sistem Persenjataan (Alutsista), non-Alutsista, dan juga Sarana Prasarana Pertahanan. Berikut tabel Rencana Anggaran Kemenhan di RAPBN 2022.

Tabel 1. Daftar Rencana Penggunaan Anggaran Kementerian Pertahanan di RAPBN 2022

Program Anggaran	APBN 2021	APBN 2022	Perubahan
Program Pelaksanaan Tugas TNI	Rp 3.533,6	Rp 3.865,2	9,38%
Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	Rp 9.806,1	Rp 12.080,9	23,20%
Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	Rp 14,4	Rp 24,7	71,53%
Program Modernisasi Alutsista, Non-Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	Rp 32.483,6	Rp 43.264,1	33,19%
Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	Rp 1.544,0	Rp 1.049,6	32,02%
Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	Rp 486,9	Rp 331,9	31,83%
Program Dukungan	Rp 70.319,9	Rp 73.307,0	4,25%

Manajemen

Total

Rp 118.188,4

Rp 133.923,4

13,31%

Sumber : Nota Keuangan RAPBN 2022

Besarnya anggaran tahun 2022 sangat menarik perhatian publik dan publik seringkali mempertanyakan mengapa anggaran sebesar itu tidak mendapatkan *refocusing* atau dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan saat pandemi ini. Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran besar Kemenhan digunakan untuk membantu tenaga kesehatan dan rumah sakit-rumah sakit dalam penyelenggaraan program vaksinasi. Belanja Kementerian Pertahanan yang didalamnya termasuk anggaran TNI dan Polri digunakan untuk mempercepat laju vaksinasi di Indonesia yang ditargetkan menysar 2 juta orang per hari agar mencapai kekebalan massal (Sembiring, 2021).

Selain itu, anggaran Kementerian Pertahanan juga difokuskan kepada pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut dikarenakan jika anggaran hanya berfokus pada isu kesehatan dan penanganan COVID-19 maka program-program lain akan tertunda. Oleh karena itu, pemerintah berfokus menangani dampak pandemi di

bidang kesehatan dan juga bidang lainnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga berpendapat bahwa besarnya anggaran Kementerian Pertahanan dikarenakan pemerintah perlu dukungan untuk sepenuhnya menjamin berbagai program pembangunan nasional supaya bisa berjalan sesuai rencana yang telah disepakati. Pembangunan nasional haruslah berjalan berdasarkan asas kepastian hukum, adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat serta terpenuhinya pertahanan negara yang kuat. Sehingga pemerintah harus tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan utama dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan *almatsus*, *essential force*, hingga penanganan tindak pidana umum, narkoba, dan terorisme (Elena, 2021).

Pengaruh Power Interplay Aktor terhadap Peningkatan Alokasi Anggaran Kementerian Pertahanan

Menteri Pertahanan RI saat ini, Prabowo Subianto, tentu memiliki andil besar terhadap peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan yang dapat dikatakan naik secara signifikan dari tahun sebelumnya dan menjadi yang terbesar di

tahun 2022. Jika dilihat kebelakang, pada debat keempat Pilpres 2019, Prabowo yang saat itu merupakan rival Joko Widodo mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa anggaran pertahanan di Indonesia relatif kecil. Pernyataan Prabowo tersebut menuai pro dan kontra saat itu. Setelah melewati rangkaian Pilpres 2019, Jokowi kembali memenangkan Pilpres tersebut dan menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Kritikan Prabowo ketika debat melawan Jokowi saat itu menjadi kenyataan. Kementerian Pertahanan di tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran terbesar di antara kementerian lain sebesar Rp 127,357 triliun disusul oleh Kementerian PUPR sebesar Rp 120,2 triliun. Tentu hal tersebut berbeda dengan anggaran di tahun sebelumnya, yakni anggaran terbesar jatuh di Kementerian PUPR Rp 110,73 triliun disusul oleh Kemenhan Rp 109,559 triliun.

Hal di atas menunjukkan adanya *power interplay* aktor terhadap peningkatan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan. Prabowo Subianto yang sebelumnya

merupakan rival Jokowi dalam Pilpres 2019, tentu menginginkan hal-hal yang telah ia sampaikan pada Pilpres 2019 terealisasi terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan yang merupakan latar belakang dari Prabowo Subianto itu sendiri. Tentu hal ini diperlukan dalam menjaga reputasi Prabowo Subianto sebagai Menteri dan juga Ketua Partai Gerindra saat ini yang merupakan partai yang cukup besar didalam negeri. Dalam kepemimpinannya, Prabowo fokus terhadap pembaruan alutsista yang dimiliki karena sudah rapuh dan harus segera diganti. Selain itu, berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2022 dijelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini akan tetap melanjutkan berbagai kegiatan prioritas dan strategis untuk mendorong terwujudnya *Minimum Essential Force* (MEF) dengan bertahap. Dengan begitu, diharapkan dapat memastikan tegaknya kedaulatan NKRI dan menjamin keselamatan dan terlindungi dari ancaman. Jadi, peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan juga dipengaruhi keberadaan aktor politik didalamnya, yakni Prabowo selaku rival Joko Widodo dalam Pilpres 2019 dan Ketua Partai Gerindra. Peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan penting bagi Prabowo Subianto untuk mewujudkan cita-citanya tentang pertahanan dan

keamanan nasional yang telah ia janjikan pada Pilpres 2019 lalu. Selain itu, reputasi pribadi bagi seorang Prabowo Subianto juga merupakan hal penting dikarenakan ketokohan beliau di kalangan warga negara serta karir politiknya yang masih memungkinkan untuk berkontestasi pada pemilihan selanjutnya. Oleh karena itu, posisi ia sekarang sebagai seorang Menteri Pertahanan merupakan ajang untuk unjuk gigi dalam mewujudkan gagasan beliau tentang pertahanan dan keamanan negara, sebagai pembuktian kinerja kepada masyarakat, dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Kementerian Pertahanan RI agar Indonesia semakin disegani oleh dunia. *Power interplay* tidak hanya terlihat dari pengaruh Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan melainkan juga dapat ditinjau dari peran legislatif sebagai lembaga pengawas yang memiliki hak budget dalam mengawasi sistem penganggaran pemerintah. Hak budget DPR telah diatur secara teknis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang dalam pembahasannya diatur

peran-peran penting DPR RI. Salah satunya yang berkaitan dengan penganggaran adalah DPR memiliki hak untuk membahas serta menetapkan alokasi anggaran untuk menjalankan program, fungsi, dan berbagai kegiatan dalam kementerian dan lembaga.

Komisi I sebagai mitra kerja dari Kementerian Pertahanan tentu berperan dalam proses penetapan anggaran Kementerian Pertahanan yang dinilai cukup kontroversial. Komisi ini diketuai oleh Meutya Hafid dari fraksi Partai Golkar dan beranggotakan 47 orang. Namun 43 orang berasal dari partai koalisi pemerintah. Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor mulusnya peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan pada saat sidang pengesahan. Pembahasan mengenai anggaran Kementerian Pertahanan antara DPR dan Kementerian Pertahanan pun diselenggarakan secara tertutup, sehingga banyak elemen masyarakat tidak mengetahui terkait urgensi atau tujuan dari peningkatan anggaran tersebut. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari publik. Padahal dalam upaya untuk menciptakan *good governance*, pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip dalam akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. *E-budgeting* memiliki peranan penting dalam mendukung penciptaan transparansi *Budget Government* dalam upaya realisasi

pembangunan program stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian negara. Oleh karena itu, sangat disayangkan DPR sebagai perwakilan suara rakyat tidak menciptakan sebuah iklim penganggaran yang transparan, akuntabel, dan juga partisipatif sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Peran Masyarakat Sipil terhadap Alokasi Anggaran Kementerian Pertahanan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah menyatakan bahwa peningkatan peran masyarakat sipil merupakan suatu hal penting dalam penciptaan iklim demokrasi yang baik di Indonesia. Masyarakat sipil pada hakikatnya merupakan sebuah konsep dimana masyarakat diyakini sebagai entitas yang mandiri dan otonom serta mampu mengembangkan dirinya sendiri serta membatasi berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat sipil juga senantiasa memperlihatkan pandangan dan sikap yang kritis pada kehidupan perpolitikan bangsa dan

negara. Masyarakat sipil diidentifikasi sebagai masyarakat yang berada dalam wilayah interaksi sosial dan mencakup semua kelompok sosial paling akrab (keluarga), asosiasi, gerakan masyarakat, dan wadah komunikasi publik yang terbentuk melalui peraturan dan mobilisasi diri secara independen (Cohen & Arato,1992).

Sementara itu, Gramsci berpendapat bahwa masyarakat sipil merupakan kumpulan organisme “privat” dan berbeda dengan masyarakat politik (Gramsci,1971). Dalam analisis ini, masyarakat sipil diidentifikasi sebagai masyarakat yang mandiri dan otonom, serta membatasi diri dari intervensi pemerintah. Selain itu, masyarakat sipil disini juga diidentifikasi sebagai masyarakat yang senantiasa memperlihatkan sikap kritis terhadap kebijakan suatu pemerintahan.

Masyarakat sipil secara operasional juga dapat diartikan sebagai institusi-institusi di luar pemerintah dan berada di masyarakat yang membentuk suatu organisasi kemasyarakatan seperti LSM, paguyuban, kelompok kepentingan, dan lain sebagainya, yang berusaha untuk membangun kemandirian organisasi dan berkontribusi terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan. Peran dari

masyarakat sipil digolongkan menjadi dua jenis yaitu internal dan eksternal. Peran internal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil oleh masyarakat sipil itu sendiri dalam pengembangan karakter dan elemen di dalamnya. Sementara itu, peran eksternal dapat dilihat dari permasalahan konteks lingkungan (*enabling enviroment*) yang mendukung masyarakat sipil dalam menjalankan peran dan sumbangsuhnya terhadap masyarakat yang menjadi target (*beneficiaries*). Dalam hal penganggaran Kementerian Pertahanan yang kontroversial, peran masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menjadi penyeimbang antara pemerintah dan masyarakat. Ketua Centra Initiative dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Al Araf memberikan pendapat bahwa sektor keamanan jika dilihat secara prinsipil merupakan barang publik yang juga menjadi bagian dari masyarakat sipil karena tujuan utama dari keamanan adalah kondisi masyarakat yang aman. Selain Al Araf, Agus Rahardjo sebagai mantan ketua KPK juga berpendapat bahwa penganggaran seharusnya dilakukan secara transparan. Seorang

ekonom di *The Institute for Development of Economics and Finance*, Didik J. Rachbini bahkan mengkritik keras besarnya anggaran Kementerian Pertahanan dan mengatakan bahwa rencana anggaran tersebut tidak pantas dan apabila disetujui maka wakil rakyat dianggap tidak tahu diri dan kurang peka terhadap kondisi pandemi saat ini (Pinterpolitik.com, 2021).

Anggaran Kementerian Pertahanan yang tidak transparan menimbulkan pertanyaan di ranah publik. Tsvetelina Yordanova dalam artikelnya yang berjudul *The Transparency-Security Dilemma in National and International Context* menyatakan bahwa transparansi dalam lembaga pertahanan di era yang modern merupakan sebuah keniscayaan. Negara-negara saat ini didorong untuk terbuka mengenai anggaran kementeriannya dikarenakan kepentingan heterogen dari komunitas internasional tidak dapat dikonsolidasikan tanpa keterbukaan informasi.

Kesimpulan

1. Anggaran adalah komponen penting dalam suatu negara, dan dalam penyusunannya diperlukan berbagai pihak yang turut serta dalam perumusan anggaran agar anggaran yang dibuat sesuai kebutuhan.

2. Kementerian Pertahanan menjadi kementerian dengan alokasi anggaran terbesar pada tahun 2022. Padahal kondisi negara kita masih belum stabil akibat dilanda pandemi COVID-19. Sehingga alokasi anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dinilai tidak relevan. Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran kementerian lainnya yang prioritas seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Sosial, alokasi anggarannya lebih sedikit dibandingkan Kementerian Pertahanan. Padahal kementerian tersebut yang harusnya lebih diprioritaskan dibandingkan Kementerian Pertahanan.
3. Penyebab Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran terbesar pada APBN 2022 antara lain adanya *power interplay* dari para aktor politik didalamnya. Baik dari Prabowo selaku Menteri Pertahanan, dan bantuan dari Komisi I DPR RI.

Daftar Pustaka

- Abdar, Y. (2018). Koalisi Partai Politik dalam UU No 10 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 53-60.
- Anwar, S. (2018). Peran Diplomasi Pertahanan dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(2), 71-94.
- Bpk.go.id. (2021). BPK Serahkan LHP Atas Laporan Keuangan, LHP Kinerja, dan LHP DTT Kementerian Pertahanan Tahun 2020. Retrieved from <https://www.bpk.go.id/news/bpk-serahkan-lhp-atas-laporan-keuangan-lhp-kinerja-dan-lhp-dtt-kementerian-pertahanan-tahun-2020>.
- Charlotte Thomson Iserbyt. (2011). *The Deliberate Dumbing Down of America: a Chronological Paper Trail*. Parkman, Ohio: Conscience Press.
- Damayanti, A. (2021). Anggaran Kemenhan Rp 133 triliun Disorot DPR, Ini Catatannya. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5717269/anggaran-kemenhan-rp-133-t-disorot-dpr-ini-catatannya>.
- Elena, M. (2021). Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Beri Jatah Anggaran Jumbo untuk Kemenhan di 2022. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210818/9/1430941/terungkap-ini-alasan-pemerintah-beri-jatah-anggaran-jumbo-untuk-kemenhan-di-2022>.
- Hadi, O. H. (2010). Peran Masyarakat Sipil dalam Proses Demokratisasi. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 14(2), 117-129.

- Hajad, V., Ikhsan, I., & Marefanda, N. (2021). Jaring Pengaman Sosial: Analisis Anggaran Penanganan COVID-19 di Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(2), 126-139.
- Hamka, M., & Nadir, S. (2022). Politik Anggaran dan Relasi Aktor dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Jurnal Politik Profetik*, 10(1), 79-98.
- Kemenkeu.go.id. (2021). Ini Fokus Anggaran Kesehatan dalam RAPBN 2022. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-fokus-anggaran-kesehatan-dalam-rapbn-2022/>.
- Kemensos.go.id. (2021). DPR Setuju Anggaran Kemensos TA 2022 RP 78,2 Triliun. Retrieved from <https://kemensos.go.id/dpr-setuju-anggaran-kemensos-ta-2022-rp782-triliun-pemberdayaan-ekonomi-jadi-perhatian-penting>.
- Kusnandar, V. B. (2022). Pemerintah Pangkas 6,6% Anggaran Kemendikbudristek dalam APBN 2022. Retrieved from <https://data>
- books.katadata.co.id/datapublish/2022/01/14/pemerintah-pangkas-66-anggaran-kemendikbudristek-dalam-apbn-2022.
- Lestyowati, J., & Kautsarina, A. F. (2020). Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocusing Kegiatan di Masa Pandemi COVID-19 Studi Kasus Bdk Yogyakarta. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 424-439.
- Merdeka.com (2022). Anggaran Kemenkes Rp96,85 Triliun, Mayoritas untuk Transformasi Kesehatan. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/anggaran-kemenkes-rp9685-triliun-mayoritas-untuktransformasi-kesehatan.html>.
- Nafrin, Hudaidah. (2021). Perkembangan Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 456-462.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pinterpolitik.com (2021). Anggaran Pertahanan Prabowo Haruskah Ditutupi? Retrieved from <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/anggaran-pertahanan-prabowo-haruskah-ditutupi/>.
- Pringgodayanti, P. (2016). *Tinjauan Realisasi Anggaran Belanja Negara di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Dalam Meningkatkan Kinerja*. Disertasi Doktoral. STIE Ekuitas.
- Purwanto, N. A. (2006). Kontribusi Pendidikan bagi Pembangunan Ekonomi Negara. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 114-456.
- Sembiring, L. J. (2021). Ini Alasan Sri Mulyani Tak Bisa Pangkas Anggaran Prabowo. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210824125540-4-270796/ini-alasan-sri-mulyani-tak-bisa-pangkas-anggaran-prabowo>
- Susanto, M. (2016). Hak Budget DPR dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 189-196.
- Surbakti, R. (2019). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

- Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (dalam Perspektif Teori Good Governance). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), 72-88.
- Willoughby, K.G. & Jossey-Bass (2014). *Public budgeting in Context: Structure, Law, Reform, and Results*. San Francisco: Jossey-Bass, A Wiley Brand, Cop.
- Zaman, K. (2009). Analisis Hubungan Patron-Klien (Studi Kasus Hubungan Toke dan Petani Sawit Pola Swadaya Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu). *IJAE Jurnal Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia*, 2(2), 183-200.